

# Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

**Elsa Fitrianita, Nurdien H Kistanto, Af'idatul Lathifah**

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275

Email: [elsafitrianita05@gmail.com](mailto:elsafitrianita05@gmail.com)

## *Abstract*

*This research was conducted to find out and describe the resistance of Menganti Kisik fishermen in the construction of the PLTU Cilacap in Menganti Village, Kesugihan District, Cilacap Regency, analyzing the sources and forms that caused the resistance of Menganti fishermen to the construction of the PLTU Cilacap and how the strategies to survive and efforts to resolve the conflict. The research method used is the ethnographic method. This research was conducted in March to May in the coastal area of Menganti Village, Menganti Kisik. The data collection techniques are carried out by means of observation, ethnographic interviews, and documentation. The data analysis techniques were carried out in an ethnographic manner with qualitative descriptions. The results of the study showed that the resistance of the Menganti Kisik fishermen occurred due to the perceived loss in the social, economic and physical sectors due to the construction of the PLTU Cilacap. Fishermen choose the hidden transcript resistance and collective resistance. The fishermen do the resistance is because of the imbalance of the work space sector and damage to the coastal and marine areas which cause coastal abrasion in Menganti Village. The kind of resistance are include the differences in perceptions between fishermen in responding to the construction of the PLTU Cilacap, compensation polemics, and expressions of resistance. The strategy of surviving fishermen in the midst of losses due to the construction of the PLTU Cilacap is to establish a social organization KUPM Menganti Kisik which is used as a medium of collective resistance.*

**Keywords :** Fishermen, PLTU Cilacap, Resistance

## **1. Pendahuluan**

Konsep Negara kepulauan sebagai konsep teritorial spasial telah dirumuskan di dalam Deklarasi Juanda Tahun 1957 tentang Perairan Teritorial Indonesia, dimana antara lain dinyatakan bahwa: "...segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, merupakan bagian-bagian dari wilayah daratan Negara Indonesia" (Adisasmita, 2006:29-30). Indonesia sebagai Negara maritim tentu mempunyai beragam potensi pembangunan ekonomi dalam berbagai sektor perairan, seperti: 1) potensi keanekaragaman hayati bidang perikanan, 2) potensi sumber daya mineral dan energi, 3) potensi pariwisata, 4) potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, 5) potensi Industri, dan berbagai

potensi lainnya. Dari sekian banyak potensi yang dimiliki oleh sektor maritim Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya ketimpangan antara sektor satu dengan sektor lainnya. Hal ini yang menyebabkan pemanfaatan wilayah maritim masih belum optimal dan memicu adanya resistensi antar pelaku pemanfaatan.

Komponen terbesar dari masyarakat pesisir adalah nelayan yang memiliki ketergantungan besar terhadap keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut. Nelayan sampai saat ini masih terus identik dengan kemiskinan. Harahap pada tahun 1992 – 1994 telah melakukan serangkaian penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan pada masyarakat pesisir di tiga desa di Pantai Timur Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan mereka adalah faktor budaya dan degradasi sumber daya. Degradasi sumber daya seperti rusaknya ekosistem mangrove dan perikanan sebagai akibat oleh penggunaan alat tangkap perikanan destruktif, aktivitas *illegal lodging*, dan alih fungsi lahan (Harahap, 2015).

Pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan pada nyatanya tidak terlepas dari masalah tragedi *open access* yang berarti bebas bagi siapa saja yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkannya. Akibat *open access* dengan doktrin milik bersama (*common property*), telah menimbulkan masalah wilayah perairan laut nasional menjadi arena pertarungan bagi pelaku-pelakunya (*stakeholder*), kebijakan seperti ini akan menjadikan masalah bagi peraturan perlindungan hukum khususnya bagi nelayan kecil maupun sumber daya ikan dan laut itu sendiri (Solihin dan Arif, 2007).

Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut Kabupaten Cilacap berpotensi menimbulkan konflik. Nelayan Menganti Kisik dan pembangunan PLTU Cilacap adalah pelaku pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Cilacap. PLTU Cilacap sebagai industri skala besar yang mendominasi wilayah pemanfaatan dikhawatirkan akan menambah permasalahan sosial, ekonomi, dan fisik. Ketimpangan sektor ruang kerja di wilayah pesisir dan degradasi sumber daya ekosistem pesisir dan laut karena proyek pembangunan perusahaan PLTU Cilacap semakin menambah kesenjangan sosial dan menempatkan nelayan pada status sosial rendah, mengakibatkan nelayan berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

Sementara itu, Negara atau pemerintah lebih mengontrol perjuangan sosial dari kepentingan ekonomi yang berbeda, dan kontrol tersebut dipegang oleh kelas yang kuat secara ekonomi dalam masyarakat. Negara menjadi alat represif dari kelas yang berkuasa. Negara dan kelas yang berkuasa juga menjalankan kekuatan hegemoni yang mampu melanggengkan kekuasaannya dari kelas dominan. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan untuk bertahan dan menjalankan misi ideologisnya terhadap massa proletar (Patria dan Andi, 2015).

Tuntutan publik yang tidak terlalu ditanggapi pada akhirnya membuat masyarakat nelayan yang diidentikan dengan kemiskinan dan status sosial rendah cenderung tidak melakukan konflik terbuka. Masyarakat nelayan akan cenderung melakukan bentuk perlawanan tertutup atau yang biasa disebut dengan istilah *hidden Transcript resistance*. Perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas, berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif dan juga bentuk-bentuk perlawanan ideologi yang menentang definisi situasi yang dominan dan menuntut sebagai standar keadilan dan kewajaran (Scott, 1985).

Resistensi yang dilakukan nelayan Menganti Kisik merupakan upaya dari mereka untuk bertahan hidup dan menuntut hak-haknya atas kerugian yang dirasakan akibat dampak pembangunan PLTU Cilacap. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi dan mendeskripsikan sumber dan bentuk resistensi yang dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik sebagai bentuk perlawanan khas mereka kepada PLTU Cilacap. Scott mendefinisikan perlawanan (*resistance*)

sebagai bentuk perlawanan kelas berupa tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya: sewa, pajak, dan gengsi) yang dibuat oleh kelas atas (tuan tanah, petani, atau negara).

Resistensi merupakan gerakan perlawanan akibat adanya konflik. Resistensi muncul dari respon pilihan untuk melakukan suatu usaha penyelesaian konflik. Masing-masing pihak mempunyai bentuk penyelesaian konflik yang berbeda, tergantung bagaimana pola kebiasaan yang ada di dalam kelompok itu sendiri. James Scott dalam bukunya yang berjudul *Domination and the Arts of Resistance Hidden Transcript* menjelaskan tentang pengertian resistensi yang merupakan suatu bentuk perlawanan yang diletakan dalam konteks hubungan dominasi (Si kaya) dan subordinasi (Si miskin). Scott juga telah membedakan bentuk resistensi menjadi dua, yaitu *Public transcript* (terbuka) dan *hidden transcript* (tertutup) (Scott, 1990).

Perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas, berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif dan juga bentuk-bentuk perlawanan ideologi yang menentang definisi situasi yang dominan dan menuntut sebagai standar keadilan dan kewajaran (Scott, 1985). Scott menjelaskan bentuk resistensi tertutup dimaknai dengan perlawanan dengan kegiatan kecil-kecilan dan insidental atau yang bersifat gejala kejahatan sekunder, mencirikan suatu sifat yang (1) tidak terorganisir, tidak sistematis, dan terjadi secara individual, (2) bersifat untung-untungan dan pamprih (nafsu akan kemudahan) mementingkan diri sendiri, (3) tidak mempunyai akibat revolusioner, dan (4) menyiratkan dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi (Scott, 1985).

Perlawanan tertutup tidak menimbulkan dampak yang buruk, hampir didalamnya tidak ada huru hara, demonstrasi, pembakaran, tidak ada kejahatan sosial terorganisir, dan tidak ada kekerasan terbuka. Perlawanan tertutup merupakan bentuk kehati-hatian. Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, menamai bentuk perlawanan ini sebagai *perlawanan primitif*. Bentuk-bentuk perlawanan demikian merupakan strategi sehari-hari yang dilakukan terus-menerus dan permanen dari kelas-kelas bawah yang selalu kalah. Perlawanan yang khas dari orang-orang kalah ini akan sulit dihilangkan selama kondisi struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 1985).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilakukan untuk melihat resistensi nelayan yang tinggal di pesisir pantai Dusun Menganti Kisik terhadap pembangunan PLTU Cilacap. Penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Etnografi. Metode Etnografi merupakan suatu prosedur penelitian dalam bidang ilmu Antropologi. Etnografi merupakan suatu pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa tujuan etnografi ialah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya (Spradley, 2007: 4).

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan informan. Pencarian informan dilakukan dengan cara *snow ball*. Informan kunci diperoleh dari lembaga pemerintah desa melalui kepala desa untuk mendapatkan informasi terkait komunitas nelayan Desa Menganti. Melalui

informan kunci peneliti mendapatkan informan yaitu Ketua nelayan KUPM Menganti Kisik. Melalui Ketua kelompok nelayan Menganti Kisik peneliti melakukan wawancara dan meminta untuk dikenalkan dengan anggota-anggotanya. Peneliti kemudian dikenalkan kepada pihak sekretaris untuk lebih lanjut meminta data-data sekunder pendukung penelitian seperti data anggota nelayan, data jumlah kapal, dan data hasil produksi dari nelayan Menganti Kisik, sehingga memudahkan untuk mencari anggota nelayan lainnya melalui data anggota nelayan yang sudah disertai dengan alamat rumah.

Peneliti juga melakukan observasi partisipasi dengan nelayan Menganti Kisik. Mengikuti setiap proses kegiatan mulai dari berangkat melaut pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi, kemudian menunggu nelayan pulang dari kegiatan melautnya pada siang hari sekitar pukul 12 siang, melihat hasil tangkapan mereka, melihat kegiatan nelayan dalam bekerja sama menurunkan mesin tempel dan hasil tangkapan nelayan, membantu nelayan yang bergotong royong menaikan perahu ke daratan, dan turut serta mengikuti proses kegiatan melayang ikan nelayan di TPI Menganti Kisik.

Wawancara peneliti lakukan dengan wawancara etnografis. Wawancara Etnografis berarti seorang etnografer melakukan wawancara sekaligus melakukan pengamatan dengan model seperti halnya wawancara atau percakapan dalam persahabatan (Spradley, 2007). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Ketua nelayan dan beberapa dari anggota nelayan Menganti Kisik. Peneliti mengalami kendala ketika menentukan waktu wawancara. Nelayan menganti Kisik tidak akan diwawancarai ketika sedang berada di pantai ataupun ketika selesai melakukan kegiatan melaut dan pelelangan ikan. Kondisi nelayan yang masih menggunakan pakaian kerja dengan kondisi basah tidak akan kondusif ketika dimintai wawancara. Peneliti mengambil waktu siang dan menjelang sore hari setelah istirahat siang, hal ini dilakukan karena pada waktu itu nelayan sudah pulang dari kegiatan melautnya dan sudah memanfaatkan istirahat siangnya. Wawancara selalu dilakukan di rumah-rumah nelayan ketika nelayan dalam kondisi sedang bersantai dan tidak bekerja.

Pengolahan data menggunakan model triangulasi yang merupakan interelasi dari tiga sumber pemahaman: masyarakat, teori dan peneliti (Thohir, 2013: 129). Analisis dilakukan secara etnografis dengan deskripsi kualitatif mengenai hasil yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Analisis Etnografis merupakan penyelidikan berbagai bagian itu sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan (Spradley, 2007: 130).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Kondisi Sosial Budaya Nelayan Menganti Kisik**

Masyarakat nelayan, sebagai suatu kesatuan sosial biasanya hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Masyarakat di kawasan pesisir, dalam konstruksi sosial merupakan bagian dari masyarakat nelayan. Masyarakat pesisir biasanya bermatapencaharian sebagai nelayan, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Desa-desa pesisir sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan. Kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007).

Nelayan merupakan salah satu dari beragam matapencaharian penduduk Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Sebagai desa yang memiliki komunitas nelayan, aktivitas perikanan tangkap di Desa Menganti berpusat di Dusun Menganti Kisik yang berada di wilayah pesisir pantai bagian selatan dan berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Ada

sekitar 2 RT yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan Menganti Kisik, yaitu RT 05 RW 11 dan RT 06 RW 11.

Nelayan Menganti Kisik dalam melakukan aktivitas melaut mulai dari jam 6 pagi dan pulang jam 12 siang atau sekitar 6 jam per hari nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Nelayan Menganti Kisik masuk dalam kategori jenis nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk kegiatan mencari ikan di laut dan memanfaatkan sedikit sisa waktu luangnya untuk beristirahat atau mencari pekerjaan sampingan lain seperti buruh tani dan buruh tambak. Berdasarkan dari kepemilikan perahu nelayan dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu nelayan pemilik perahu (Juragan) dan nelayan buruh (tidak memiliki perahu) atau yang biasa kita sebut dengan Anak Buah Kapal (ABK). Satu perahu biasanya terdiri dari 4 awak, 1 nelayan pemilik perahu dan 3 nelayan buruh.

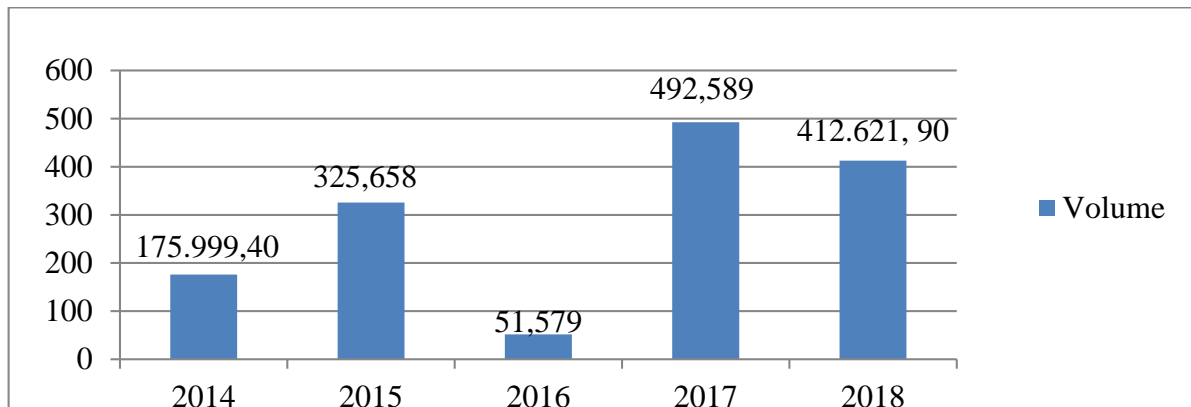
Persiapan yang dibutuhkan ketika melaut sangat sederhana dan itu hanya disiapkan oleh juragan atau pemilik perahu, bagi nelayan ABK mereka cukup tinggal berangkat saja dan membawa perbekalannya masing-masing seperti bekal untuk makan dan juga rokok. Perbekalan pokok yang dibawa nelayan ketika melaut seperti mesin, bensin, bekal untuk makan, jaring atau alat penangkap ikan, wadah, dan es. Jenis alat penangkapan ikan yang biasa atau lebih dominan dipakai oleh nelayan ialah Arad (Pukat harimau), Sirang, Jaring Ciker, dan Pancing. Produksi yang dihasilkan dari pemakaian alat penangkapan ikan itu beragam dan menyesuaikan alat tangkap yang digunakannya. Musim yang dialami oleh nelayan Menganti Kisik ada dua, yaitu musim ikan atau nelayan sering menyebutnya dengan *rejean* dan musim sepi ikan atau sedang *paila*. Sistem bagi hasil, nelayan Menganti Kisik menggunakan sistem dibagi tiga. Dua bagian untuk pemilik perahu, satu bagian untuk kebutuhan perahu dan satu bagian untuk awak perahu.

**Tabel 1. Klasifikasi Alat Tangkap dan Jenis Ikan**

No.	Jenis Alat Tangkap	Jenis Ikan	Jumlah Hari per Trip
1	Arad (pukat harimau) dengan ukuran 1,5 Inc	Rebon, Udang Krosok, dan ikan-ikan kecil seperti Montok, Lendra	1 hari
2	Sirang, ukuran 5 Inc	Dawah/ Bawal	2-3 hari
3	Ciker	Udang Barat, dan Ikan-ikan besar seperti Montok dan Lendra	2-3 hari
4	Pancing	Ikan Tongkol dan Layur	2-3 hari

Perkembangan produksi hasil laut yang diperoleh nelayan di TPI Menganti Kisik tidak selalu membuahkan nilai produksi yang meningkat. Perkembangan produksi ikan pada TPI Menganti Kisik tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi yang naik dan turun. Dari tahun 2014 – 2015 produksi mengalami kenaikan dan kemudian turun secara signifikan pada tahun 2016. Mengalami kenaikan lagi cukup drastis pada tahun 2017 dan sedikit mengalami penurunan produksi pada tahun 2018.

**Tabel 2. Perkembangan Produksi laut TPI Menganti Kisik Tahun 2014-2018**



Sumber: Data Produksi KUPM Menganti Kisik 2014-2018

### 3.2. Dampak Pembangunan PLTU Cilacap

Pembangunan PLTU Cilacap mulai dibangun pada tahun 2000. Ada dua fase dalam pembangunan PLTU Cilacap dari 3 Unit PLTU Cilacap yang sudah dibangun sampai saat ini. Fase pertama dengan ekspansi sebesar 2 x 300 MW, menjalankan pengoperasian 2 Unit PLTU yang diresmikan pada bulan Februari dan November 2006 oleh Presiden SBY. Fase kedua dengan ekspansi sebesar 1 x 1.000 MW, yang telah diresmikan tahap pertamanya sebesar 1 x 660 oleh Presiden Jokowi. Pembangunan PLTU Cilacap tahun 2000-an merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan pihak swasta yang memiliki agenda dalam program industri ketenagalistrikan. Program pembangunan 10.000 MW pembangkit listrik tenaga uap batubara ini didasarkan pada Peraturan Presiden RI No 71 Tahun 2006. Berisi tentang program percepatan diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak maka diperlukan upaya untuk melakukan pembangunan tenaga listrik yang menggunakan batubara.

PLTU Cilacap dikembangkan oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dengan saham sebesar 49% dan perusahaan swasta PT Sumber Segara Primadaya (S2P) dengan saham 51%. Proyek PLTU Cilacap ini telah direncanakan dan dibangun pada lahan seluas 170 Ha dan dengan modal sekitar 18,2 triliun (Agustinus, 2016). Pembangunan PLTU Cilacap memang ditujukan untuk kepentingan umum sebagai salah satu upaya dalam pengadaan listrik negara, namun hal itu tidak menjadikan PLTU Cilacap dibangun tanpa adanya masalah dan dampak bagi nelayan Menganti Kisik.

PLTU Cilacap sebagai industri skala besar yang mendominasi wilayah pemanfaatan dikhawatirkan akan menambah permasalahan bagi nelayan Menganti Kisik dalam sosial, ekonomi, dan fisik. Misalnya, sektor sosial akan merubah tatanan sosial dan memunculkan ketimpangan pada sektor wilayah kerja; sektor ekonomi akan mengurangi hasil tangkapan dan pendapatan para nelayan; dan sektor fisik berdampak pada kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai.

### **a. Dampak Sosial**

Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat nelayan Menganti Kisik mempengaruhi dalam sistem tatanan organisasi kelompok sosial nelayan. Adanya perubahan kondisi sosial sebelum dan sesudah dibangunnya perusahaan PLTU Cilacap memberikan dampak perubahan sosial bagi masyarakat nelayan Menganti Kisik. Perubahan sosial dapat menjadi gejala sosial yang hanya berkaitan dengan pembangunan. Perubahan sosial menyangkut pada aspek-aspek sosial demografis dari masyarakat dan aspek struktural dari organisasi sosial. Perubahan ini meliputi suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya yang lebih bermartabat (Mulyadi, 2015).

PLTU Cilacap yang dibangun di wilayah pesisir dalam pelaksanaan pembangunannya lebih didominasi pekerja asing. Hal ini memunculkan rasa ketidaksukaan nelayan Menganti Kisik kepada para pekerja asing yang banyak beraktifitas dilingkungan desanya. PLTU Cilacap dalam pengoprasiaannya lebih memprioritaskan pekerja asing untuk menempati posisi-posisi strategis, dan pekerja lokal lebih diutamakan sebagai pekerja proyek lapangan. Karakteristik lapangan kerja yang berbeda dengan peluang kerja di PLTU Cilacap yang kurang menjanjikan bagi nelayan Menganti Kisik membuat nelayan tidak ingin mengambil peluang untuk turut serta bekerja dalam perusahaan PLTU Cilacap. Akhirnya untuk terus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang mengalami perubahan, nelayan Menganti Kisik membentuk suatu organisasi KUPM Menganti Kisik (Kelompok Usaha Perikanan Mandiri Menganti Kisik) sebagai bentuk strategi bertahan hidup di tengah pembangunan PLTU Cilacap.

Ketimpangan wilayah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif vertikal dan horizontal. Perspektif vertikal melihat ketimpangan dari sudut administratif, contohnya ketimpangan di tingkat eropa, ketimpangan di tingkat nasional dan ketimpangan di tingkat lokal, sedangkan perspektif horizontal melihat ketimpangan dari aspek-aspek yang mempengaruhinya seperti aspek sosial, ekonomi dan fisik (Kutscherauer, dkk, dalam Aprianoor, 2015). Pembangunan PLTU Cilacap yang terlalu menjorok ke laut mengakibatkan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dengan nelayan Menganti Kisik. Nelayan menjadi terganggu dalam kegiatan pencarian ikan ketika melaut. Pembuatan dermaga PLTU Cilacap yang dikhususkan untuk berlabuhnya kapal *tongkang* pengangkut barang dan batubara milik PLTU Cilacap membuat nelayan Menganti Kisik menjadi dirugikan. Pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang menjorok ke laut pun membuat perubahan rute berlayar nelayan. Rute dalam melakukan kegiatan melaut pun berubah menjadi memutar lebih jauh dan harus melewati dermaga dulu dan menghabiskan bensin nelayan.

### **b. Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi dirasakan oleh nelayan dengan membandingkan sebelum dan sesudah dibangunnya PLTU Cilacap. Tempat yang dulunya sebelum ada PLTU Cilacap digunakan sebagai tempat *mijah* atau menyebar bibit-bibit ikan oleh nelayan Menganti Kisik sekarang menjadi hilang. Nelayan memang sudah terbiasa dengan penghasilan tidak menetap karena faktor utama pendapatan nelayan Menganti Kisik sangat bergantung dengan volume produksi yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan menangkap ikan.

Persepsi bahwa musim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap volume produksi yang mempengaruhi pendapatan nelayan menjadikan nelayan dalam posisi yang pasrah terhadap kondisi alam dan takdir Tuhan. Jika masyarakat desa lain menjadikan kesempatan bagi warganya untuk

dapat bekerja di perusahaan PLTU Cilacap sebagai pengganti ganti rugi, lain halnya dengan masyarakat nelayan Menganti Kisik yang mempunyai karakteristik berbeda dan lebih suka bekerja di laut akan mengabaikan kesempatan itu.

Faktor keturunan dan kesadaran status juga mempengaruhi seseorang bertahan dengan mata pencahariannya sebagai nelayan. Nelayan tidak memiliki ketertarikan untuk bekerja di perusahaan PLTU Cilacap. Perbedaan karakteristik dan kesadaran status pendidikan yang rendah turut melatar belakangi mengapa nelayan tidak mau bekerja di industri pembangunan PLTU Cilacap yang nantinya hanya akan menjadi pekerja proyek.

Kondisi dan persepsi seperti ini membuat nelayan tidak terlalu menyalahkan pihak PLTU Cilacap dalam hal ekonomi pendapatannya. Masyarakat nelayan Menganti kisik menjadi kurang nyaring dalam menyampaikan tuntutan-tuntutannya atas kerugian dalam hal pendapatan yang mereka rasakan akibat pembangunan PLTU Cilacap.

### c. Dampak Lingkungan

Sektor lingkungan mengakibatkan terjadinya kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi pantai. Hal ini akibat pembangunan PLTU Cilacap menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya alam pengoprasiannya secara sederhana prinsip kerja sebuah pembangkit listrik tenaga uap dapat dijelaskan sebagai berikut: batubara dibakar dalam sebuah ruang bakar untuk mendidihkan air laut yang sudah dimasukan kedalam ketel uap. Uap bertekanan ini kemudian dialihkan menuju turbin yang akan merubah energi *thermokimia* untuk menjadi energi kinetik rotasi. Turbin uap ini terhubung dengan generator listrik sehingga ketika turbin berputar generator akan bekerja dalam menghasilkan energi listrik (Kumara, 2009).

Pengoprasian PLTU Cilacap dalam aktivitasnya cenderung menggunakan alat dan daya yang besar alam proses menyedot air ke dalam ketel uap, hal ini akan berpotensi membawa partikel pasir yang akan mengurangi volume pasir di area pesisir dan akan mengakibatkan abrasi pantai. Kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi saat ini telah nyatakhususnya di peisir pantai Cilacap Utara. Ada sekitar 3 lokasi pesisir Cilacap Utara yang lokasinya dekat dengan pembangunan PLTU Cilacap dan pesisir tempat berlabuh perahu nelayan terkena dampak abrasi, yakni nelayan Menganti Kisik, nelayan Lengkong, dan nelayan Tegal Kamulyan. Proses terjadinya abrasi pantai di wilayah pesisir karena kegiatan pengerukan pasir yang menjadikan terbentuknya kubangan yang memicu migrasi pasit pantai ke daerah kubangan sehingga menyebabkan erosi pantai (Ongkosongo, dalam Vatria: 2010).

Limbah pembuangan air panas dan pencemaran batubara juga merusak keadaan ekosistem laut. Suhu panas akibat pembuangan limbah air panas PLTU dan pencemaran air laut dari batubara mengakibatkan berkurangnya ikan yang ada di kawasan pesisir Pantai Menganti Kisik. Pencemaran udara dari hasil pembuangan limbah gas ke udara dan debu truk-truk pengangkut material bangunan dari PLTU Cilacap, semakin menambah dampak kerusakan dan tidak sehatnya lingkungan yang membuat tidak nyaman masyarakat nelayan Desa Menganti Kisik.

Kebijakan pembangunan yang bertumpu pada masa orde baru dalam hal pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pemerataan ternyata telah gagal dalam pengaplikasiannya dan belum bisa mengantarkan Indonesia mencapai tingkat kesejahteraan. Pembangunan sektoral yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi telah menimbulkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan beragam ketimpangan antar daerah (Kusnadi, 2015).

Akibat Pembangunan ekonomi yang menjadi skala utama dalam pembangunan Indonesia maka sebagai negara berkembang akan mudah muncul fenomena dan permasalahan pencemaran dan



kerusakan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali maupun dominasi kepentingan ekonomi yang mengabaikan kondisi dan kemampuan lingkungan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup (Rahmi, 2011).

### 3.3. Resistensi Nelayan Menganti Kisik

Dampak dan kerugian dari adanya pembangunan industri skala besar PLTU Cilacap telah dijadikan pemantik bagi nelayan Menganti Kisik untuk melakukan suatu resistensi. Unsur propaganda menjadi bagian dari resistensi tertutup nelayan Menganti Kisik. Scott (1985), menjelaskan bahwa propaganda yang biasanya terjadi pada perlawanan kecil-kecilan berupa argumentasi yang melambungkan dan memberi label tentang peristiwa yang sedang dirasakan dan terjadi di suatu desa. Nelayan Menganti Kisik beranggapan bahwa pembangunan PLTU Cilacap adalah model negatif dari kelas penguasa di wilayah desanya. PLTU Cilacap telah mengganggu tatanan sosial mereka. Ketimpangan di wilayah pesisir dan laut dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada abrasi pantai Menganti Kisik telah dijadikan sumber utama nelayan melakukan resistensi.

Pembangunan dermaga PLTU Cilacap pada tahun 2016 telah mengakibatkan kerugian bagi nelayan Menganti Kisik. Ketimpangan yang mereka rasakan adalah keharusan untuk berbagi sektor ruang kerja dengan perusahaan PLTU Cilacap. Pembangunan dermaga PLTU Cilacap dianggap merugikan bagi mobilisasi nelayan dalam mencari ikan. Semakin panjang dermaga yang dibangun PLTU Cilacap untuk berlabuhnya *Tongkang* semakin banyak dan besar pula kerugian yang akan dirasakan oleh nelayan karena nelayan harus berputar melewati dermaga, dengan demikian jarak yang ditempuh oleh nelayan menjadi semakin panjang. Nelayan juga beranggapan bahwa PLTU Cilacap memiliki status sosial yang lebih tinggi sehingga menimbulkan ketimpangan. Biasanya untuk menghemat bahan bakar, nelayan Menganti Kisik ada yang suka mencari ikan di dekat dermaga. Tidak jarang juga banyak jaring dari nelayan yang *kecangkol* atau tersangkut di dermaga. Hal ini menjadi keluhan nelayan sehingga mereka berusaha meminta ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap.

Kerusakan lingkungan pesisir seperti abrasi pantai telah nyata terjadi di sepanjang pesisir pantai dan laut Desa Menganti. Kondisi seperti ini tentu membuat nelayan Menganti Kisik khawatir. Permasalahan di atas dijadikan cara bagi nelayan Menganti Kisik sebagai pihak yang mengalami kerugian untuk sedikit melakukan usaha mencari keadilan dengan cara meyakinkan tentang fakta kerugian yang dirasakan oleh nelayan adalah akibat pembangunan PLTU Cilacap dan menuntut ganti rugi.

Secara umum nelayan Menganti Kisik memang merupakan pihak yang sudah pasti terkena dampak dan kerugian akibat pembangunan PLTU Cilacap. Resistensi tertutup dan diam-diam yang dilakukan oleh nelayan bukan tanpa alasan. Adanya perbedaan persepsi antar nelayan membuat perbedaan cara menyikapi dalam sebuah kontes perlawanan. Status sosial ekonomi yang berbeda antar nelayan turut mempengaruhi sikap mereka dalam menilai dampak dan kerugian dari adanya pembangunan PLTU Cilacap.

Nelayan buruh (ABK) biasanya akan lebih banyak mengeluh karena merasa sangat dirugikan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Hal ini karena mereka melihat adanya fenomena baru di lingkungan desanya dengan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi yang didominasi oleh para pekerja asing, dan dengan kesadaran mereka bahwa dengan karakteristik dan status sosial ekonominya saat ini, mereka tidak akan bisa menyamai, dan tidak bisa juga masuk dan ikut serta dalam agenda pembangunannya. Lain halnya dengan nelayan pemilik perahu (Juragan),

dengan status sosial ekonomi pendapatan yang lebih tinggi dari nelayan ABK, yang menjadi contoh nelayan sejahtera dilingkungan desanya meskipun merasa telah dirugikan namun dalam pembawaannya lebih tenang dan tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi terkait dampak pembangunan PLTU Cilacap.

Kondisi perbedaan persepsi seperti ini dalam teori James Scott dinamakan sebagai dinamika konflik, dimana dinamika konflik itu menjadi ada dan dilakukan secara kecil-kecilan yang merupakan bentuk perlawanan dalam suatu perang dingin dengan simbol-simbol antara nelayan Menganti Kisik dan PLTU Cilacap. Adanya Rasa permusuhan dalam perang kecil, seperti arena yang selalu berubah karena perbedaan persepsi dan di mana menjadi terdapat banyak orang netral yang melihat dari pinggir lapangan saja dan para pelaku yang seakan tidak mau dengan loyalitas terpecah (Scott, 1985).

Ganti rugi memang sudah di berikan oleh pihak PLTU Cilacap, akan tetapi ketidaksesuaian pihak PLTU Cilacap dalam memberikan ganti rugi kepada nelayan juga masih menimbulkan polemik dan memicu nelayan melakukan resistensi. Pembangunan PLTU Cilacap pada tahun 2000-an tidak langsung memberikan ganti rugi kepada nelayan Menganti Kisik. Tahun 2010 nelayan mandiri dan membentuk kelompok KUPM Menganti Kisik, setelah tiga tahun berjalan dari pihak PLTU Cilacap masih belum memberikan ganti rugi apapun, nelayan merasa jika dari kelompok tidak meminta maka dari pihak PLTU Cilacap tidak akan memberikan ganti rugi. Tahun 2014 nelayan melalui kelompok masuk ke perusahaan PLTU Cilacap dan menyuarakan tuntutan atas hak-hak mereka dan sejak saat itu ganti rugi mulai diberikan.

Ganti rugi yang tidak sesuai sering muncul dari tuntutan nelayan Menganti Kisik kepada pihak PLTU Cilacap tentang persoalan pembangunan dermaga. Nelayan merasa seharusnya semua ganti rugi yang diberikan oleh pihak PLTU Cilacap dilakukan secara adil dan berkelanjutan atau jangka panjang karena kerugian yang dirasakan nelayan atas ketimpangan wilayah sektor kerja juga bersifat permanen. Namun di sisi lain pihak PLTU Cilacap merasa ganti rugi hanya diberikan pada saat berlangsungnya pembangunan yang mengganggu aktivitas nelayan pada waktu itu saja tanpa adanya kelanjutan.

Nelayan Menganti Kisik merasakan kerugian fisik yang nyata sehingga mereka merasa bahwa sudah sepantasnya PLTU Cilacap tidak memperlakukan jika dimintai ganti rugikarena PLTU Cilacaplah yang menyebabkan kerugian mereka. Isu Permasalahan yang menjadi dasar tuntutan permintaan ganti rugi menjadikan motivasi dan usaha bagi nelayan Menganti Kisik untuk terus menuntut dengan harapan memperoleh hasil atas hak-haknya. Seperti dalam penilaian Scott (1985), orang-orang akan selalu mengajukan angka-angka dalam mengoreksi, begitupun nelayan Menganti Kisik, akan selalu menanyakan tentang angka-angka ketika membahas soal ganti rugi dengan harapan untuk terus meningkatkan pendapatannya. Nelayan Menganti Kisik akan selalu menyatakan bahwa perihal pemberian ganti rugi masih kurang.

Ekspresi resistensi juga masuk ke dalam bentuk resistensi simbolis yang dilakukan nelayan Menganti Kisik kepada pihak PLTU Cilacap. Bentuk dari resistensi simbolis yang murni, dengan gosip jahat membicarakan pihak ketiga yang sama sekali tidak menggunakan sikap hormat. Di balik setiap cerita gosip terdapat berita, dan pernyataan tersirat tentang suatu peraturan norma yang telah dilanggar (Scott, 1985). Ketidakadilan dan dominasi terhadap ekonomi dan wilayah sektor kerja oleh PLTU Cilacap yang kebanyakan pelakunya adalah pekerja asing, hal ini menciptakan perasaan tidak suka dikalangan nelayan Menganti Kisik. Pekerja asing dianggap bertanggung jawab dalam pembangunan PLTU Cilacap karena mereka merupakan wujud dari kelas elit yang mendominasi bidang kerja strategis dan telah mengganggu aktivitas nelayan. Tata kelakuan yang berbeda dengan keseharian nelayan namun hidup di permukiman nelayan ini dijadikan sebagai media bagi nelayan

Menganti Kisik untuk mewujudkan ekspresi dari rasa ketidaksukaan mereka dengan cara *ngrasani* atau gosip, dan mengumpat kepada para pekerja asing.

Pembangunan PLTU Cilacap telah membawa masalah kerugian bagi nelayan Menganti Kisik terkait dampak ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, KUPM Menganti Kisik sangat berperan penting sebagai strategi bertahan hidup nelayan Menganti Kisik dan untuk menjaga hak-haknya dari ketidakadilan. Tujuan didirikannya KUPM Menganti Kisik juga sebagai upaya memperoleh keadilan dengan menuntut ganti rugi atas pembangunan PLTU Cilacap, dengan demikian nelayan Menganti Kisik tidak merasa sangat dirugikan. Ganti rugi tersebut sekalipun tidak sesuai dengan dampak kerusakan dan ketimpangan tetapi memberikan sedikit ketenangan dan meminimalisir kebencian. Scott (1985), memberi pengertian bahwa masalahnya bukan pada harapan-harapan ini yang senantiasa diamati dan dipraktikan, melainkan bahwa harapan memang ada, dan jika dilanggar atau tidak dipenuhi, pelanggaran itu akan memancing kebencian dan penolakan.

**Tabel 3. Strategi Bertahan Hidup Nelayan dari Sumber Pendapatan**

Prioritas	Sumber Pendapatan
I.	Hasil volume produksi yang diperoleh
II.	Tabungan di KUPM Menganti Kisik
III.	Bantuan/ ganti rugi PLTU Cilacap.
IV.	Koprasi KUB Mina Menganti

Tabel 3. Menjelaskan prioritas hasil pendapatan nelayan menganti Kisik yang tergabung kedalam KUPM Menganti Kisik. Pendapatan utama nelayan Menganti Kisik diperoleh dari hasil tangkapan ikan yang sesuai dengan keadaan musim dan volume produksi pada saat melaut. Adanya KUPM Menganti Kisik kini pengelolaan keuangan nelayan menjadi terprogram. Diadakannya tabungan nelayan menjadikan nelayan mempunyai alternatif pendapatan lain. Tujuan didirikannya KUPM Menganti Kisik juga sebagai upaya memperoleh keadilan dengan menuntut ganti rugi atas pembangunan PLTU Cilacap, dengan demikian nelayan Menganti Kisik tidak merasa sangat dirugikan. Ganti rugi tersebut sekalipun tidak sesuai dengan dampak kerusakan dan ketimpangan tetapi memberikan sedikit ketenangan dan meminimalisir kebencian. KUPM Menganti kisik juga menyediakan koprasi nelayan yang diberi nama KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mina Menganti. KUB Mina Menganti didirikan dari hasil dana yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya untuk dikembangkan dananya.

Organisasi sosial KUPM Menganti Kisik yang mengandung unsur gerakan sosial dimanfaatkan oleh nelayan sebagai media untuk perlawanan kolektif mereka kepada pihak PLTU Cilacap. Menurut Sztompka, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama perilaku kolektif. Batasan gerakan sosial secara sedikit formal dijelaskan oleh Harton, yakni gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan (Kamaruddin, 2012). Perlawanan kolektif merupakan karakteristik dari suatu gerakan sosial. Hal ini karena gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap penguasa) (Ashartanto, 2018).

Nelayan Menganti Kisik bukan menjadi pihak yang berinteraksi secara langsung dengan pihak PLTU Cilacap, nelayan hanya menjadi korban dari adanya dampak kerusakan dan ketimpangan sektor ruang kerja dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, perlu

adanya bentuk perlawanan secara kolektif melalui KUPM Menganti Kisik dimaksud untuk menggalang kekuatan melawan pihak PLTU Cilacap agar bisa mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka atas kerugian yang dirasakan.

Perlawanan dilakukan oleh nelayan melalui KUPM Menganti Kisik juga atas dasar kesadaran sosial mereka. Nelayan merasa kurang pandai dalam melakukan hubungan sosial dengan masyarakat di luar kelompoknya sehingga perlawanan dilakukan sesuai dengan karakteristik nelayan. KUPM Menganti Kisik bisa dikatakan hanya sebagai media perlawanan kolektif yang dijadikan tumpangan para nelayan untuk mengutarakan keluhan, keresahan, dan menuntut keadilan kepada pihak PLTU Cilacap.

Ganti rugi dalam praktiknya membutuhkan syarat dan tahapan dalam pengalokasiannya. Dana ganti rugi akan lebih mudah diberikan melalui suatu organisasi kelompok. KUPM Menganti Kisik dijadikan media oleh nelayan untuk menyalurkan dana ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap, oleh karena itu bagi siapa saja nelayan yang tergabung menjadi anggota kelompok KUPM Menganti Kisik pasti akan menerima dana ganti rugi dari PLTU Cilacap.

**Tabel 4. Peran Pemerintah Terhadap KUPM Menganti Kisik**

<b>Prioritas</b>	<b>Peran Pemerintah Kabupaten dan Desa</b>
I.	Mendukung penuh Pembangunan PLTU Cilacap
II.	Memberikan kepercayaan kepada nelayan Menganti Kisik untuk mandiri dalam kegiatan sosial ekonomi melalui KUPM Menganti Kisik sehingga kurang diperhatikan
III.	Hanya sebagai fasilitator, pengawas, dan mediator nelayan Menganti Kisik dan PLTU Cilacap

Setelah KUPM Menganti Kisik mandiri memang pemerintah Desa Menganti tidak memberikan alokasi dana kepada kelompok nelayan. Bahkan terkadang kelompok nelayan KUPM Menganti Kisik yang memberikan dana ke desa. Pemerintah hanya berkontribusi dalam memberikan rekomendasi atau masukan ketika nelayan akan mengadakan suatu acara besar seperti sedekah laut. Kegiatan lain dari pemerintah Kabupaten Cilacap dan Desa Menganti biasanya mereka memberikan pengawasan, penyuluhan, serta menjembatani KUPM Menganti Kisik dengan pihak PLTU Cilacap.

Keadaan nelayan Menganti Kisik akan selalu terpinggirkan dari agenda kepentingan pembangunan ekonomi sektoral di bidang industri oleh pemerintah Kabupaten Cilacap karena Pembangunan PLTU Cilacap yang dibangun di dekat pesisir pantai desanya. Oleh karena itu, nelayan Menganti Kisik harus melakukan suatu pilihan yang tepat dalam upaya penyelesaian konfliknya yakni melalui KUPM Menganti Kisik. Meskipun dalam kenyataannya pilihan yang sudah dipilih tetap akan menjadikan posisinya masih dalam kerugian, namun setidaknya jalan yang dipilih bisa memberikan ruang untuk terus memperoleh hasil untuk meminimalisir kerugian.

## **4. Simpulan**

Adanya pembangunan PLTU Cilacap di wilayah pesisir dan laut telah menambah permasalahan baru bagi nelayan Menganti Kisik. Pembangunan PLTU Cilacap telah mengakibatkan dampak kerugian sosial, ekonomi, dan fisik bagi nelayan dan memicu timbulnya potensi konflik. Hal ini karena kebijakan pembangunan dirasakan berat sebelah dan hanya berfokus pada

pembangunan sektoral, dalam hal ini PLTU Cilacaplah yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Nelayan sebagai pihak yang selalu diidentikkan dengan kondisi status sosial rendah akan selalu menjadi pihak yang terpinggirkan.

Kondisi demikian membuat nelayan Menganti Kisik memilih bentuk perlawanan dengan tindakan resistensi tertutup dan kecil-kecilan sebagai upaya untuk mempertahankan hak-haknya yang terancam akibat pembangunan PLTU Cilacap. Resistensi nelayan Menganti Kisik dilakukan dengan cara mengambil isu kerugian yang nyata dan dirasakan oleh nelayan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Pembangunan PLTU Cilacap dirasa telah menjadi sumber penyebab kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi, dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja akibat pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang mengganggu aktivitas melaut nelayan.

Resistensi nelayan Menganti Kisik dilakukan dengan cara mengambil isu kerugian yang nyata dan dirasakan oleh nelayan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Pembangunan PLTU Cilacap dirasa telah menjadi sumber penyebab kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi, dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja akibat pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang mengganggu aktivitas melaut nelayan. Bentuk Resistensi nelayan Menganti Kisik seperti: pertama, resistensi telah memunculkan perbedaan persepsi yang menjadikan dinamika konflik antara nelayan ABK dan Juragan dalam menyikapi dampak pembangunan PLTU Cilacap; kedua, resistensi nelayan karena ganti rugi yang tidak sesuai dari pihak PLTU Cilacap dan menimbulkan polemik. Pemanfaatan wilayah pesisir yang bersifat *open access* dengan keyakinan milik bersama (*common property*) sangat merugikan nelayan dan sumber daya hayati laut; ketiga, resistensi nelayan dalam bentuk ekspresi resistensi. Ekspresi resistensi merupakan bentuk perlawanan simbolis yang khas dengan karakteristik nelayan kepada pekerja asing di PLTU Cilacap. Nelayan melakukan model ekspresi resistensi dalam bentuk *ngrasani* atau gosip, mengumpat dengan kata-kata kotor, dan perusakan nama baik yang dilakukan di belakang dan juga di depan dan ditujukan kepada para pekerja asing.

KUPM Menganti Kisik merupakan organisasi sosial yang dimiliki oleh nelayan. Adanya KUPM Menganti Kisik sangat berfungsi bagi nelayan, yakni sebagai strategi bertahan hidup nelayan dan media perlawanan kolektif kepada pihak PLTU Cilacap. KUPM Menganti Kisik sebagai strategi bertahan hidup membuat kondisi ekonomi nelayan menjadi terprogram dan memiliki banyak alternatif sumber pendapatan.

Bertolak dari simpulan itu, peneliti memberikan **saran**: Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam upaya mendukung pembangunan wilayah pesisir dan laut yang memiliki beragam potensi sumber daya sebaiknya memperhatikan konsep pembangunan terpadu dan partisipatori. Pembangunan yang berpengaruh pada masyarakat luas dan lingkungan harus mendapat perhatian yang mendasar dan ditempatkan pada posisi yang jelas danimbang sehingga menciptakan sikap saling menghormati dan memberi ruang antar *stakeholder*.

PLTU Cilacap sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional memiliki peran yang penting, namun di sisi lain sebagai industri skala besar yang dibangun di wilayah pesisir dan laut tentu tidak terlepas dari dampak kerugian yang ditimbulkan bagi nelayan Menganti Kisik. Pemerintah harus lebih memperhatikan nelayan Menganti Kisik yang menjadi pihak yang terkena dampak kerugian dari pembangunan PLTU Cilacap.

Ganti rugi adalah upaya dari pihak PLTU Cilacap melalui skema CSR PLTU Cilacap untuk mengganti kerugian yang dirasakan oleh nelayan Menganti Kisik. Pengalokasian ganti rugi selama ini masih menimbulkan permasalahan bagi nelayan. Pemerintah dalam hal ini bisa mengambil peran sebagai pihak yang dapat membantu pengalokasian ganti rugi agar dapat tersalurkan secara efektif dan bermanfaat bagi nelayan. Peningkatan kualitas nelayan bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lokal secara terpadu sehingga dapat menciptakan

kesejahteraan nelayan. Nelayan didampingi dan didorong untuk dapat mengembangkan hasil tangkapan ke dalam berbagai bentuk potensi usaha dari berbagai produk olahan ikan yang dapat meningkatkan perekonomian nelayan. Peluang lain ialah dengan meningkatkan kualitas kelembagaan sosial KUPM Menganti Kisik untuk menangani dan meningkatkan kualitas teknologi alat tangkap yang dibutuhkan nelayan untuk menunjang kegiatan operasi penangkapan ikan agar mendapatkan volume produksi yang meningkat.

Upaya demikian yang dijumpai oleh pemerintah menjadikan nelayan Menganti Kisik memiliki kesiapan dan kemampuan dalam meningkatkan ekonomi yang dapat dinikmati dalam jangka panjang. Hal demikian setidaknya dapat mengurangi resistensi nelayan dari adanya pembangunan PLTU Cilacap di wilayah kerjanya karena nelayan sudah dibekali dengan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bertahan hidup di tengah arus globalisasi dan industri yang merubah di lingkungan desanya.

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinus, Michael. 2016. PLTU 'Raksasa' di Cilacap Rp 18,2 T Mulai dibangun. *Detik finance*. 12 Oktober. <https://finance.detik.com/energi/d-3318730/pltu-raksasa-di-cilacap-rp-182-t-mulai-dibangun> (Diakses pada 9 Juli 2019)
- Aprianoor, Pritha, dan Muhammad Muktiali. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 4 No. 5. Hal. 484-498. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Ashartanto, Muhammad Candra. 2018. *Perlawanan Masyarakat UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ginkel, Rob van. 2007. *Coastal Cultures: An Antropology of Fishing and Whaling Tradition*. Apeldoorn: Het Spinhuis Publisher.
- Harahap, R Hamdani. 2015. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kamaruddin, Syamsu A. 2012. Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan pada Masa Pendudukan Jepang). *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Juli 2012: 19-35.
- Kumara, Nyoman S. 2009. Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW. *Jurnal Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*. Vol. 8 No. 1. Bali: Kampus Bukit Jimbaran.
- Kusnadi. 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu: Strategi Mengatasi Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi, Mohammad. 2015. Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 4 Desember: 311-322.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmi, Elita. 2011. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 5. Juli. [online-journal.unja.ac.id](http://online-journal.unja.ac.id)

- Solihin, Akhmad., dan Arif Satria. 2007. Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 1.
- Scott, C. James. 1985. *Weapons Of The Weak: Everiday Forms Of Peasant Resistance*. London: Yale University Press
- \_\_\_\_\_. 1990. *Domination And the Arts Of Resistance: Hidden Transcripts*. London: Yale University Press.
- Spradley, James P. 2007. *Penelitian Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Thohir, Mudjahirin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. Semarang: Fasindo.
- . 1990. *Domination And the Arts Of Resistance: Hidden Transcripts*. London: Yale University Press.
- Vatria, Belvi. 2010. Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkan. *Jurnal Belian*, Vol. 9, No. 1 Januari: 47-54.